



OPEN ACCESS

INTEGRASI DATA EKONOMI ANTAR LEMBAGA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI KEBIJAKAN PUBLIK

Alfa Rizi Azhari

alfariziazhari965@gmail.com

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Muhammad Irwan Padli Nasution

irwannst@uinsu.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstrak. Economic data integration between institutions is a crucial element in realizing efficient, targeted, and evidence-based public policies. This study uses a descriptive qualitative approach to examine the actual conditions of economic data integration in Indonesia, the challenges faced, and its impact on the efficiency of public policies. Data were obtained through in-depth interviews with informants from various government agencies and studies of related policy documents. The results of the study show that despite the existence of national policies such as One Data Indonesia, data integration has not been running optimally due to technical constraints, low institutional coordination, and inadequate regulations and supporting infrastructure. As a result, public policies are often inefficient and less responsive to actual needs. These findings emphasize that successful data integration requires cross-sector synergy, strengthening data governance, and ongoing political commitment.

Keywords: data integration, public policy, efficiency, economic data, One Data Indonesia

Abstrak. Integrasi data ekonomi antar lembaga merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kebijakan publik yang efisien, tepat sasaran, dan berbasis bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji kondisi aktual integrasi data ekonomi di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap efisiensi kebijakan publik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari berbagai instansi pemerintah serta studi dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan nasional seperti Satu Data Indonesia, integrasi data belum berjalan optimal akibat kendala teknis, rendahnya koordinasi kelembagaan, serta belum memadainya regulasi dan infrastruktur pendukung. Akibatnya, kebijakan publik seringkali tidak efisien dan kurang responsif terhadap kebutuhan aktual. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi data memerlukan sinergi lintas sektor, penguatan tata kelola data, serta komitmen politik yang berkelanjutan.

Kata kunci: integrasi data, kebijakan publik, efisiensi, data ekonomi, Satu Data Indonesia

PENDAHULUAN

Peran data dalam pengambilan keputusan publik telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan ketersediaan data dalam volume besar (big data), dengan kecepatan tinggi (real-time), dan dalam berbagai format (structured dan unstructured). Dalam konteks kebijakan ekonomi, data memegang peranan vital sebagai dasar analisis untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing nasional.

Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah fragmentasi dan ketidakselarasannya data antar lembaga pemerintah. Data ekonomi yang dihasilkan oleh institusi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan lembaga-lembaga lainnya sering kali bersifat sektoral,

terpisah, dan kurang terintegrasi. Masing-masing lembaga memiliki metodologi, frekuensi pengumpulan, format, dan standar metadata yang berbeda-beda. Akibatnya, data yang seharusnya menjadi alat sinergi justru menjadi sumber diskordinasi.

Ketidakterpaduan data ini berdampak luas terhadap efisiensi kebijakan publik. Pertama, pemerintah menghadapi kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang responsif karena keterbatasan akses terhadap data lintas sektor yang saling terhubung. Kedua, analisis ekonomi makro maupun mikro menjadi tidak optimal karena tidak didukung oleh data yang konsisten dan interoperabel. Ketiga, upaya evaluasi dan monitoring kebijakan publik menjadi terhambat, karena data yang digunakan tidak saling mendukung dan sulit untuk diverifikasi silang (cross-check).

Di sisi lain, inisiatif reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government) telah membuka peluang besar untuk memperkuat integrasi data antar lembaga. Pemerintah melalui berbagai inisiatif seperti Satu Data Indonesia (SDI) mencoba membangun kerangka koordinasi nasional untuk integrasi data. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar, mulai dari rendahnya komitmen kelembagaan, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga resistensi terhadap perubahan budaya kerja dan berbagi data (data sharing).

Dari perspektif kebijakan, integrasi data ekonomi bukan sekadar isu teknis, melainkan juga menyangkut aspek kelembagaan, hukum, dan politik. Perlu ada mekanisme koordinasi yang kuat, tata kelola data yang baik, serta jaminan keamanan dan perlindungan data yang memadai agar integrasi data dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kebijakan publik.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa integrasi data ekonomi antar lembaga merupakan fondasi penting dalam membangun kebijakan publik yang lebih efisien, berbasis bukti (evidence-based policy), dan adaptif terhadap dinamika global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi data ekonomi dapat meningkatkan efisiensi kebijakan publik, menganalisis hambatan-hambatan utama yang dihadapi, serta merumuskan strategi implementasi yang efektif melalui pendekatan multi-stakeholder.

Dengan fokus pada konteks Indonesia dan pembelajaran dari praktik internasional, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan integrasi data nasional, sekaligus mendorong terciptanya sinergi antarlembaga yang lebih solid dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

1. Teori Sistem Informasi Manajemen (Management Information Systems Theory)
Teori Sistem Informasi Manajemen menjelaskan bagaimana penggunaan sistem informasi yang terstruktur dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam organisasi, termasuk lembaga pemerintah. Dalam konteks integrasi data ekonomi antar lembaga, sistem informasi berperan penting sebagai platform yang memungkinkan pertukaran dan sinkronisasi data yang akurat dan terkini. Dengan sistem yang terintegrasi, lembaga dapat mengakses informasi lintas sektor secara real-time, sehingga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan kecepatan serta kualitas pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

2. Teori Koordinasi Antar Lembaga (Interagency Coordination Theory)

Teori ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam rangka mencapai tujuan bersama, khususnya dalam pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Integrasi data ekonomi antar lembaga menjadi salah satu bentuk koordinasi strategis yang memungkinkan pemerintah bekerja secara lebih kolaboratif dan terkoordinasi. Ketika data disatukan dan dianalisis bersama, kebijakan yang dihasilkan akan lebih holistik, terhindar dari tumpang tindih, serta mampu menjawab kebutuhan publik secara lebih akurat. Dengan kata lain, koordinasi berbasis data memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi dan adaptif.

3. Teori Big Data dalam Pemerintahan (Big Data Governance Theory)

Teori big data governance menjelaskan bagaimana data dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat dikelola untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam konteks kebijakan publik, integrasi data ekonomi mencerminkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan data secara maksimal guna menciptakan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Teori ini menekankan pentingnya kualitas data, standar interoperabilitas, keamanan informasi, serta regulasi yang mengatur penggunaan dan distribusi data antar lembaga. Penerapan prinsip-prinsip big data governance memungkinkan lembaga-lembaga negara mengoptimalkan fungsi mereka secara lebih efisien dan transparan.

4. Teori Efisiensi Organisasi (Organizational Efficiency Theory)

Teori efisiensi organisasi mengkaji bagaimana suatu institusi dapat mencapai hasil optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Integrasi data ekonomi antar lembaga dapat mengurangi pemborosan anggaran, duplikasi kerja, serta mempercepat proses pembuatan dan evaluasi kebijakan. Ketika data dari lembaga fiskal, statistik, keuangan, dan sektor lainnya dikonsolidasikan, proses analisis menjadi lebih cepat dan akurat, yang pada akhirnya mendorong efisiensi dalam perumusan kebijakan. Efisiensi ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Teori Kebijakan Publik Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy Making Theory)

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan data dan fakta yang valid, bukan sekadar asumsi atau tekanan politik. Integrasi data ekonomi antar lembaga menyediakan dasar yang kuat untuk analisis dan perumusan kebijakan yang objektif dan terukur. Dengan data yang saling terhubung dan lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi permasalahan secara akurat, merancang intervensi yang tepat, serta mengevaluasi dampak kebijakan secara lebih ilmiah. Teori ini menempatkan integrasi data sebagai fondasi penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berhubungan dengan fenomena sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana integrasi data ekonomi antar lembaga terjadi, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap efisiensi kebijakan publik. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Langkah pertama adalah reduksi data, yakni menyaring dan menyusun informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti tantangan teknis dalam integrasi sistem, resistensi kelembagaan, praktik kolaboratif, dan dampak integrasi terhadap efisiensi kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting terkait kondisi aktual integrasi data ekonomi antar lembaga di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut, serta pengaruhnya terhadap efisiensi kebijakan publik. Temuan dibagi ke dalam beberapa subtema utama berdasarkan analisis tematik yang dilakukan.

Kondisi Terkini Integrasi Data Ekonomi Antar Lembaga

Hasil wawancara dan telaah dokumen menunjukkan bahwa inisiatif integrasi data ekonomi antar lembaga sudah mulai dibangun melalui kebijakan nasional, khususnya melalui program Satu Data Indonesia (SDI). SDI, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, bertujuan menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks data ekonomi, lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Bappenas telah mulai berkoordinasi dalam penyusunan dan pembaruan data ekonomi makro maupun sektoral.

Meski demikian, implementasi integrasi tersebut belum berjalan optimal. Beberapa lembaga masih mengembangkan sistem data mereka secara terpisah dan menggunakan standar yang berbeda-beda, baik dalam format data, frekuensi pembaruan, maupun klasifikasi informasi. Akibatnya, sinkronisasi data antar lembaga sering kali tidak terjadi secara otomatis dan masih memerlukan proses manual yang memakan waktu. Kondisi ini menghambat konsistensi data dan menyulitkan para pengambil kebijakan untuk memperoleh gambaran ekonomi yang menyeluruh dan real-time.

Tantangan Teknis dan Kelembagaan

Dari hasil wawancara, sejumlah tantangan utama dalam integrasi data ekonomi berhasil diidentifikasi. Tantangan pertama adalah ketidakseragaman sistem informasi dan infrastruktur teknologi antar lembaga. Masing-masing institusi memiliki sistem pengelolaan data internal yang dibangun dengan arsitektur dan perangkat lunak yang berbeda, sehingga menyulitkan proses interoperabilitas. Selain itu, belum semua lembaga

memiliki kapasitas SDM teknologi informasi yang memadai untuk mendukung integrasi data lintas instansi.

Tantangan kedua bersifat kelembagaan, yaitu rendahnya koordinasi dan komitmen antar lembaga dalam berbagi data. Beberapa lembaga masih memiliki kecenderungan untuk mempertahankan eksklusivitas data karena alasan otonomi birokrasi, keamanan informasi, atau pertimbangan politis. Ketidakhadiran mekanisme sanksi maupun insentif juga menyebabkan proses integrasi berlangsung lambat. Dalam banyak kasus, inisiatif integrasi hanya bersifat formal administratif, namun belum terimplementasi secara substansial dalam praktik pengelolaan data sehari-hari.

Tantangan ketiga adalah aspek regulasi dan perlindungan data, di mana belum terdapat kerangka hukum yang cukup kuat untuk memastikan standardisasi dan keamanan data ekonomi nasional. Meskipun sudah ada kebijakan SDI, banyak institusi yang belum mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam aturan internal mereka. Belum adanya sistem pertukaran data nasional yang andal dan terstandar juga menyebabkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

Dampak terhadap Efisiensi Kebijakan Publik

Ketidaaan sistem data yang terintegrasi secara langsung berdampak negatif terhadap efisiensi kebijakan publik. Tanpa data yang akurat dan konsisten, proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi berbasis asumsi atau estimasi kasar. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, alokasi anggaran yang tidak efisien, dan program yang tumpang tindih. Sebagai contoh, ketidaksinkronan data tentang distribusi pelaku usaha mikro antara BPS dan Kementerian Koperasi mengakibatkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan pemerintah pada masa pandemi COVID-19.

Sebaliknya, ketika data antar lembaga mulai terintegrasi, efisiensi kebijakan meningkat secara signifikan. Beberapa inisiatif sukses telah muncul, misalnya integrasi data penerimaan negara antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, yang mampu meningkatkan transparansi fiskal dan mempersempit potensi penghindaran pajak. Praktik integrasi ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan dukungan teknologi yang tepat, sinergi data antar lembaga dapat mengarah pada peningkatan kinerja kebijakan publik secara keseluruhan.

Praktik Baik dan Peluang Perbaikan

Penelitian ini juga menemukan beberapa praktik baik (best practices) yang dapat dijadikan model replikasi. Salah satunya adalah pengembangan dashboard ekonomi digital terpadu oleh Bappenas, yang mengintegrasikan berbagai indikator makroekonomi dan sektoral untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional. Inisiatif ini melibatkan kerja sama dengan BPS dan Bank Indonesia, dan telah mampu menyajikan data lintas sektor dalam format visual yang mudah diakses oleh pengambil kebijakan.

Selain itu, peluang besar terbuka melalui pemanfaatan teknologi berbasis cloud computing, application programming interface (API), serta penguatan data warehouse nasional. Teknologi ini dapat mempercepat proses pertukaran data antar lembaga dan mengurangi biaya integrasi sistem yang selama ini menjadi kendala utama. Namun, penerapannya tetap memerlukan regulasi yang jelas serta peningkatan kapasitas SDM di masing-masing lembaga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi data ekonomi antar lembaga merupakan langkah strategis yang krusial dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih efisien dan berbasis bukti. Integrasi data tidak hanya meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi pemerintah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, mempercepat respons kebijakan, dan menurunkan biaya birokrasi. Meski demikian, realisasi integrasi memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat dalam hal koordinasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan investasi pada teknologi serta sumber daya manusia.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan lintas sektor dalam reformasi tata kelola data. Pemerintah perlu membentuk badan koordinasi independen atau meningkatkan peran sekretariat Satu Data Indonesia untuk memastikan integrasi berjalan secara sistemik dan berkelanjutan. Tanpa langkah nyata menuju integrasi yang utuh, kebijakan publik akan terus berisiko tidak efisien, tidak adaptif, dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi data ekonomi antar lembaga merupakan elemen fundamental dalam upaya meningkatkan efisiensi kebijakan publik di Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy), keterpaduan informasi antar institusi menjadi kunci agar pemerintah dapat merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan secara lebih akurat, tepat sasaran, dan hemat sumber daya.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun telah ada inisiatif formal seperti Satu Data Indonesia (SDI), implementasi integrasi data ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Hambatan tersebut mencakup perbedaan standar teknis antar sistem informasi, rendahnya koordinasi dan komitmen antar lembaga, belum optimalnya infrastruktur teknologi, serta minimnya regulasi yang menjamin interoperabilitas dan keamanan data. Akibat dari ketidakterpaduan ini adalah rendahnya efisiensi dalam pengambilan kebijakan, yang seringkali menyebabkan duplikasi program, inefisiensi anggaran, serta rendahnya akurasi intervensi pemerintah di sektor ekonomi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa praktik baik yang menunjukkan bahwa integrasi data dapat diwujudkan secara efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat, perencanaan teknologi yang terstruktur, serta mekanisme koordinasi yang berfungsi secara aktif. Keberhasilan sebagian inisiatif lintas lembaga dalam membangun sistem data bersama menunjukkan bahwa arah integrasi ini memungkinkan dan dapat direplikasi pada skala yang lebih luas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan integrasi data ekonomi antar lembaga bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan reformasi kelembagaan, tata kelola data, serta komitmen politik dalam membangun budaya berbagi data antar instansi. Tanpa integrasi data yang solid, kebijakan publik akan terus menghadapi risiko rendahnya efektivitas dan efisiensi, serta kesulitan dalam merespons dinamika ekonomi nasional dan global secara adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Judjanto, L., & Putri, R. (n.d.). *PEMERINTAHAN BERBASIS DATA: MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN BIG DATA UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Kamrul Ahsan, A. H. M. (2023). Inter-agency Coordination. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 6887–6891). Springer.
- KERAKYATAN, P. S. E., DESA, K., TERTINGGAL, P. D., & INDONESIA, D. A. N. T. R. (n.d.). *INTEGRASI ANTAR-LEMBAGA DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PERDESAAN*.
- Ma, D., Zhou, J., & Zuo, M. (2022). Inter-agency information sharing for Chinese e-government development: a comparison between vertical and horizontal dimensions. *Information Technology for Development*, 28(2), 297–318.
- Priyanda, V. M., Ningrum, S., Buchari, R. A., & Deliarnoor, N. A. (2023). Inconsistency in Implementing General Government Affairs in Bekasi City (Implementing the Program of National Vigilance and Facilitation of Social Conflict Resolution 2015-2022). *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 50(5).
- Statistik, B. P. (2019). Statistical yearbook of Indonesia. *Badan Pusat Statistik*. Jakarta. ISSN/ISBN, 126, 2912.
- Wahyuni, H., Mutiarin, D., Ismail, N. S. A., & Febriani, W. (2025). Inter-Agency Data Interoperability in Local Government for Sustainability in Data Governance. Available at SSRN 5185989.
- Wang, F. (2018). Understanding the dynamic mechanism of interagency government data sharing. *Government Information Quarterly*, 35(4), 536–546.